

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BARANG MEWAH DI E- COMMERCE

Ratna Kartika Indraswari

Abstrak

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak – hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang – undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi e-commerce. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan yaitu pertama apakah Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce, kedua Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen barang mewah yang seharusnya diatur dalam transaksi e-commerce, ketiga Permasalahan – permasalahan apa yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen barang mewah dalam transaksi e-commerce dan bagaimana cara mengatasinya. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, karena merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan pertama bahwa Undang – undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia. Dan keterbatasan akan hak – hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Kedua perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, dari sisi konsumen, dari sisi produk, dari sisi transaksi. Ketiga permasalahan permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu pertama permasalahan yuridis, meliputi keabsahan perjanjian menurut KUHPerdara, Penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce, UUPK yang 7tidak akomodatif, tidak adanya lembaga penjamin toko online kedua permasalahan non yuridis meliputi, kemandirian bertransaksi dan tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi e-commerce.

Kata kunci : Perlindungan konsumen, transaksi e-commerce

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS ON E-COMMERCE LUXURY GOODS TRANSACTIONS

Ratna Kartika Indraswari

Abstract

Trading activities in the community have grown very rapidly. The growth of internet-based technology known as e-commerce has influenced this. E-commerce is a type of trade with its own set of characteristics, such as cross-national trading via the internet and the absence of face-to-face meetings between sellers and purchasers. On the one hand, this situation benefits consumers because they have more options for purchasing products and services, but on the other hand, consumer rights violations are more risky due to the specific characteristics of e-commerce. Therefore, legal protection for consumers is very much needed in e-commerce transactions. Legal protection for consumers is regulated by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This law is expected to guarantee legal certainty for consumers in e-commerce transactions. In connection with this, in this thesis three issues are raised, first whether the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 can protect consumers in conducting e-commerce transactions, secondly how is the legal protection for consumers of luxury goods that should be regulated in e-commerce transactions, third What problems arise in the legal protection of consumers of luxury goods in e-commerce transactions and how to overcome them. The methodology used in this study uses an empirical normative approach, because it is a legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. Based on the discussion of the research results, it can be concluded first that the consumer protection law No. 8 of 1999 has not been able to protect consumers in e-commerce transactions because of the limited understanding of business actors who are only specifically in the territory of the Republic of Indonesia. And the limitations of consumer rights regulated in Law on Consumer Protection. Second, legal protection for consumers that should be regulated includes legal protection from the side of business actors, from the consumer side, from the product side, and from the transaction side.

Keywords: consumer protection, e-commerce transactions